

BAB IV PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Perjanjian perdagangan bebas yang disepakati antara Indonesia dengan Cina, resmi di implementasikan pada tanggal 1 Januari 2010. Perdagangan bebas ini berupa pembebasan tarif masuk 0%, semenjak mulai diberlakukan perjanjian ini, Indonesia sudah terkena dampak yang sangat meresahkan dan akan membawa pengaruh yang sangat signifikan bagi perekonomian nasional.

Hal ini dibuktikan dengan membanjirnya produk-produk buatan Cina di pasar Indonesia, bagaimana tidak, buatan Cina harga yang ditawarkan lebih murah, dan lebih beragam sehingga konsumen golongan ekonomi ke bawah di dalam negeri lebih memilih untuk menggunakan produk Cina tersebut, akibatnya industri-industri kalah bersaing, produksi terganggu, pengurangan tenaga kerja, dan berujung pada penutupan industri tersebut yang akan mengganggu stabilitas ekonomi di Indonesia.

Dampak yang dirasakan Indonesia dari adanya ACFTA ini dapat dilihat dari sektor industri alas kaki, untuk industri alas kaki sebelum ACFTA di implementasikan tahun pertama mengalami surplus 2,38%, lalu tahun berikutnya surplus kembali 3,78% dan setelah ACFTA mengalami defisit secara berturut-turut dari tahun pertama sampai tahun berikutnya 4,53% menjadi 7,94%. Dari akumulasi data dapat dikatakan bahwa stabilitas Indonesia cenderung tidak stabil.

Indonesia sangat terkena dampak dari adanya perjanjian ACFTA ini, maka dari itu pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk memperbaiki dan melindungi industri-industri domestik dari serbuan barang-barang Cina yang sudah menguasai pasar domestik Indonesia. Pemerintah perlu menyusun strategi dan mengambil kebijakan yang tepat salah satunya dengan melakukan renegotiasi dengan Cina, penguatan dan pengamanan pasar domestik, meningkatkan produksi barang, selain itu kebijakan pembangunan industri dan perdagangan pemerintah Indonesia bertekad untuk meningkatkan produksi dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan dengan meningkatkan produktivitas nasional secara terus menerus melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan sumber daya manusia.

Dampak dari perjanjian perdagangan bebas langsung dirasakan oleh industri-industri domestik dan berujung pada terganggunya stabilitas ekonomi maka dari itu pemerintah mengambil kebijakan fiskal yang mencakup tentang pengaturan pengeluaran dan penerimaan APBN. Salah satu cara yang dapat digunakan pemerintah untuk mempengaruhi penerimaan APBN yakni pengaturan terkait tarif pajak.

Apabila pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan tarif pajak untuk produk-produk ekspor dan impor, hal tersebut jelas akan mempengaruhi kondisi stabilitas perekonomian nasional utamanya industri yang berbasis pada ekspor seperti contoh industri alas kaki.

Apabila pemerintah menaikkan tarif pajak untuk produk-produk ekspor maka dapat berpotensi mengurangi kapasitas produksi dan kemampuan daya saing produk dari industri alas kaki. Bila dalam waktu yang bersamaan, pemerintah menerapkan kebijakan yang penurunan tarif bea masuk untuk produk-produk impor sesuai dengan perjanjian ACFTA maka kondisi tersebut jelas akan memberikan keuntungan bagi produk-produk impor dan potensi untuk mendominasi pasar domestik akan semakin besar.

Begitu pun sebaliknya, ketika pemerintah menurunkan tarif bea keluar untuk produk-produk ekspor maka jelas akan menjadi peluang besar bagi industri seperti industri alas kaki untuk memperbesar pangsa pasarnya. Hal tersebut dikarenakan, pelaku industri akan dapat menekan biaya produksi sehingga peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dapat diperoleh. Akan tetapi, hal buruk dari kebijakan ini yakni, kebutuhan akan produk alas kaki domestik kemungkinan tidak terpenuhi.

Hal ini terjadi karena para produsen akan lebih memilih untuk memasarkan produknya keluar negeri bila dibandingkan dalam negeri dengan iming-iming keuntungan besar. Namun apabila kebutuhan dalam negeri dapat dipenuhi maka, kebijakan tersebut berhasil mengurangi impor alas kaki Indonesia dari Cina bilamana pemerintah menaikkan tarif bea masuk dari Cina maka hal tersebut jelas akan menekan masuknya produk impor dari Cina.

Perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dengan Cina sudah terlanjur di sepakati oleh pemerintah Indonesia walaupun membawa pengaruh yang cukup mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia, namun Indonesia masih bisa mengambil peluang dari adanya ACFTA ini.

Indonesia negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan pastinya Cina tidak memiliki yang satu ini, maka dari itu pemerintah perlu jeli dalam melihat dan memanfaatkan potensi tersebut. Sehingga tercipta produk unggulan yang dapat diekspor agar menopang perekonomian nasional, lapangan kerja bertambah dan pengangguran akan sedikit berkurang lalu akan tercipta kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam bidang perdagangan luar negeri adalah bagaimana meningkatkan daya saing terhadap ekonomi negara-negara kawasan yang makin meningkat pertumbuhan dan produktifitasnya. Serbuan produk-produk Cina semenjak ACFTA diberlakukan sangat meresahkan bagi industri-industri domestik. Selain itu yang tidak kalah penting masih lemahnya sistem hukum yang ada di Indonesia.

IV.2. Saran

- a. Pemerintah seharusnya meningkatkan sumber daya manusia Indonesia dengan memberikan pelatihan kepada para pekerja atau melakukan sosialisasi mengenai ACFTA kepada para pelaku usaha agar mereka dapat meningkatkan kreatifitas dan menambah jumlah produksi.
- b. Pemerintah seharusnya memberikan intensif atau pinjaman modal dengan suku bunga yang rendah kepada para usaha kecil dan menengah.